

**AFFIRMATIVE ACTION DAN PERAN PEREMPUAN DALAM STRUKTURAL  
PARTAI: STUDI KASUS PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG**

**Abdul Naser Parinduri<sup>1</sup>, Bella Zanjabila<sup>2</sup>, Diandra Malindo<sup>3</sup>, Fatma Jazilatunnafis<sup>4</sup>, Lutfi  
Choirunisa<sup>5</sup>, Maya Dina Rahma Maghfiroh<sup>6</sup>, Radhita Kusuma Wardani<sup>7</sup>, Yunita Alifya Husnul  
Hidayah<sup>8</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: [abdulnaserparinduri18@students.unnes.ac.id](mailto:abdulnaserparinduri18@students.unnes.ac.id)

Email: [bellazanjabilaa@gmail.com](mailto:bellazanjabilaa@gmail.com); [diandraputri@students.unnes.ac.id](mailto:diandraputri@students.unnes.ac.id);

[fatmajzltn@students.unnes.ac.id](mailto:fatmajzltn@students.unnes.ac.id); [lutfichoironisa15@student.unnes.ac.id](mailto:lutfichoironisa15@student.unnes.ac.id);

[mayadina507@students.unnes.ac.id](mailto:mayadina507@students.unnes.ac.id); [radhitakusumawardani2004@students.unnes.ac.id](mailto:radhitakusumawardani2004@students.unnes.ac.id);

[alifyaa600@students.unnes.ac.id](mailto:alifyaa600@students.unnes.ac.id)

**ABSTRACT**

The representation of women in Indonesian politics still a challenge despite the implementation of affirmative action policies, such as the 30% quota for female candidates. This study aims to evaluate the application of affirmative action within the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in Semarang City, using John Rawls' distributive justice theory, Pitkin's theories of descriptive and substantive representation, and the concept of affirmative action. This qualitative research employs a case study approach, incorporating semi-structured interviews and observations of the party's activities in Semarang City. The findings reveal that while PDI Perjuangan has achieved women's representation within its party structure, substantive challenges persist. Women's representation in the party extends beyond fulfilling quotas but has yet to fully provide space for active participation in strategic decision-making. Therefore, further evaluation of affirmative action implementation is necessary to ensure its positive impact on the quality of democracy and gender equality in local politics. This study recommends that political parties prioritize women's empowerment through political training and access to resources to foster more inclusive change.

**Keywords:** Affirmative action, Womens Representation, PDI Perjuangan.

**ABSTRAK**

Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menjadi tantangan meskipun kebijakan affirmative action, seperti kuota 30% calon perempuan, telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan affirmative action di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Semarang, dengan menggunakan teori keadilan distributif John Rawls, teori representasi deskriptif dan substantif dari Pitkin, serta teori affirmative action. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap kegiatan partai di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PDI Perjuangan berhasil mencapai keterwakilan perempuan dalam masih ada. Representasi perempuan di partai ini lebih dari sekadar sepenuhnya member ruang bagi perempuan untuk berperan strategis. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi affirmative action diperlukan untuk memastikan dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam politik lokal. Penelitian ini menyarankan agar partai politik lebih mengutamakan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan politik dan akses ke sumber daya untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** Affirmative action, Keterwakilan Perempuan, PDI Perjuangan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:

**SINTA 5**



**PKP|INDEX**



## PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu fundamental dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Dalam demokrasi yang inklusif, representasi perempuan tidak hanya mencerminkan pencapaian kesetaraan gender, tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Pitkin (1967), keterwakilan politik yang ideal meliputi *descriptive representation* (kesamaan karakteristik antara wakil dan yang diwakili) dan *substantive representation* (pembawaan kepentingan kelompok ke dalam keputusan politik). Di Indonesia, ketimpangan gender dalam politik tetap menjadi hambatan besar, meskipun kesadaran terhadap isu ini semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan *affirmative action*, yang mewajibkan partai politik untuk menempatkan setidaknya 30% calon perempuan dalam daftar calon legislatif, diharapkan dapat menjadi langkah signifikan untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut.

Kebijakan *affirmative action* ini berlandaskan pada teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa kebijakan yang adil harus memberikan peluang kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk mencapai posisi yang setara. Dalam konteks politik Indonesia, *affirmative action* menjadi salah satu cara untuk membuka akses perempuan ke dalam politik, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk hambatan kultural dan struktural yang menghambat partisipasi penuh perempuan. Stereotip gender yang menganggap politik sebagai ranah laki-laki dan nilai-nilai patriarki yang mendalam di masyarakat menjadi kendala utama dalam memperjuangkan kesetaraan di dunia politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan salah satu contoh partai politik yang konsisten dalam mendorong keterwakilan perempuan. Sebelum diterapkannya kebijakan kuota 30% dalam undang-undang, PDI Perjuangan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan adanya ruang bagi perempuan dalam struktur partainya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas peran yang dijalankan. Ini sejalan dengan teori feminisme institusional yang diungkapkan oleh Squires (2007), yang menekankan pentingnya transformasi institusi untuk mendukung partisipasi perempuan. Dalam pandangan ini, keterwakilan perempuan harus diukur tidak hanya dari jumlah perempuan dalam struktur politik, tetapi juga sejauh mana mereka memengaruhi pengambilan keputusan.

Di Kota Semarang, PDI Perjuangan telah berhasil mencapai keterwakilan perempuan yang signifikan dalam struktur partai. Hal ini mencerminkan penerapan *affirmative action* yang tidak hanya simbolis, tetapi juga substantif, sebagaimana diungkapkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995) mengenai partisipasi politik perempuan. Perempuan di PDI Perjuangan Kota Semarang terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan, kampanye, dan kegiatan sosial, menunjukkan bahwa *affirmative action* dapat meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, meskipun kuota perempuan sering dipenuhi secara formal, tantangan yang lebih besar masih terletak pada hambatan informal seperti marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai implementasi *affirmative action* di PDI Perjuangan Kota Semarang untuk menilai apakah keterwakilan perempuan hanya bersifat formal atau benar-benar substansial.

Penting untuk dicatat bahwa keterwakilan perempuan dalam politik juga terkait dengan teori keadilan sosial dan demokrasi deliberatif. Mansbridge (1999) berpendapat bahwa keterwakilan perempuan memberikan pluralitas suara yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, implementasi *affirmative action* di Indonesia juga mencerminkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *affirmative action* dalam struktur partai PDI Perjuangan di Kota Semarang, serta mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam politik lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan affirmative action dan memberikan rekomendasi bagi partai politik lain untuk menerapkan langkah serupa demi tercapainya kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan affirmative action di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap proses, tantangan, dan hasil kebijakan dalam meningkatkan peran perempuan di ranah politik. Lokasi penelitian berfokus pada kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai pusat kegiatan administratif dan pengambilan kebijakan partai di tingkat kota. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Untung Sudjarno S.H. Wawancara ini dirancang untuk mengungkap pemahaman dan perspektif mengenai implementasi affirmative action di tingkat struktural partai. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi partai, buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis. Teknik pengumpulan data juga mencakup observasi terhadap aktivitas internal partai, seperti rapat dan kegiatan kaderisasi, untuk melengkapi wawancara dengan informasi faktual mengenai pelaksanaan kebijakan. Seluruh data dianalisis secara tematik dengan merujuk pada teori keadilan distributif oleh John Rawls, teori representasi deskriptif dan substantif oleh Hanna Pitkin, serta konsep affirmative action.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Affirmative Action di PDI-Perjuangan Kota Semarang

Affirmative action adalah kebijakan atau tindakan yang diambil untuk meningkatkan peluang kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan akses terhadap sumber daya. Kebijakan ini sering kali diterapkan untuk membantu kelompok yang kurang terwakili, seperti perempuan, kelompok minoritas etnis atau agama, dan masyarakat adat. Di Indonesia, salah satu bentuk kebijakan ini adalah kewajiban untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif (caleg), yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender.

PDI Perjuangan Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang jelas dalam implementasi kebijakan affirmative action untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam struktur partai dan pencalonan legislatif. Sebelum adanya regulasi yang mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30%, partai ini sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan tersebut, yang dipelopori oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan beliau yang dihormati dan berpengaruh dalam partai membuat kebijakan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam visi dan misi PDI Perjuangan.

Di tingkat Kota Semarang, penerapan kebijakan affirmative action terlihat pada struktur organisasi partai. Dalam Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC), terdapat perwakilan perempuan yang signifikan. Dari total 19 pengurus yang ada, 6 di antaranya adalah perempuan. Ini menunjukkan adanya keberpihakan nyata terhadap perempuan dalam ruang politik di level partai. Selain itu, PDI Perjuangan Kota Semarang juga menerapkan kebijakan affirmative action dalam pencalonan legislatif. Meskipun tidak ada regulasi formal yang mengatur sebelumnya, partai ini sudah mengusahakan agar setiap daerah pemilihan (dapil) mencantumkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kota Semarang tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen untuk memajukan keterwakilan perempuan dalam politik.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga mencerminkan langkah-langkah nyata yang diambil

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

oleh PDI Perjuangan untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam arena politik. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan tidak hanya berfokus pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga menciptakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang lebih luas, baik di level legislatif maupun dalam struktur partai. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip dasar dari keadilan distributif yang berupaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam politik.

Dengan demikian, kebijakan affirmative action yang diterapkan oleh PDI Perjuangan di Kota Semarang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat dari partai dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan setara. Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan dalam politik dan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan berusaha membuka peluang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan bangsa melalui jalur politik.

### Strategi dan Keterwakilan Perempuan dalam Struktur Partai dan Legislative

PDI Perjuangan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia. Berdasarkan teori representasi deskriptif dan substantif yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin, keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang hadir dalam struktur partai atau lembaga legislatif (representasi deskriptif), tetapi juga dari kemampuan perempuan untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan politik (representasi substantif). Dalam hal ini, PDI Perjuangan telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencapainya.

#### a. Strategi Keterwakilan Perempuan dalam Struktur Partai

PDI Perjuangan Kota Semarang menerapkan sejumlah strategi untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam struktur partai. Salah satu langkah yang signifikan adalah penerapan sistem zipper dalam pencalonan legislatif, yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan 30% di setiap level pencalonan. Hal ini memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk dipilih dan berpartisipasi aktif di parlemen. Selain itu, PDI Perjuangan juga mengedepankan perempuan di posisi-posisi strategis dalam struktur partai. Misalnya, di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kota Semarang, 6 dari 19 pengurus adalah perempuan, yang mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip kesetaraan gender.

#### b. Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif

Dalam hal legislatif, PDI Perjuangan mengimplementasikan strategi kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam dunia politik, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam Pemilu terakhir, PDI Perjuangan berhasil mencalonkan sejumlah perempuan di daerah pemilihan strategis, yang diikuti oleh keberhasilan beberapa dari mereka dalam meraih kursi legislatif. Langkah ini menunjukkan bahwa partai ini tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan sosial yang berkeadilan.

**Tabel 1: Calon Perempuan PDI-Perjuangan di Pileg Kota Semarang 2024**

NAMA DAPIL	JUMLAH CALON	CALON PEREMPUAN
DAFIL 1	7	3
DAFIL 2	12	4
DAFIL 3	9	3

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:

**SINTA 5**



PKP|INDEX



DAPIL 4	9	4
DAPIL 5	7	3
DAPIL 6	7	3

Sumber: Data diolah dari KPU

c. Program Pemberdayaan dan Pendidikan Perempuan

PDI Perjuangan juga berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Program-program seperti pelatihan urban farming, penanggulangan bencana, dan pendidikan cyber dirancang untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan memperkenalkan mereka pada isu-isu politik. Dengan program-program ini, perempuan tidak hanya dilatih untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, tetapi juga dipersiapkan untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan politik. PDI Perjuangan memastikan bahwa perempuan memiliki bekal yang cukup untuk berkontribusi dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

d. Penempatan Strategis dan Partisipasi Politik

Strategi penempatan perempuan dalam posisi-posisi strategis, baik di partai maupun di legislatif, mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Tidak hanya sekadar memenuhi kuota, tetapi penempatan perempuan di posisi-posisi penting bertujuan untuk menciptakan perubahan yang substansial dalam pembuatan kebijakan. Partai ini memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berperan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk perempuan itu sendiri. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

### Hambatan dan Tantangan PDI-Perjuangan dalam Implementasi Affirmative Action

PDI Perjuangan telah berkomitmen untuk mendukung keterwakilan perempuan melalui kebijakan *affirmative action*, seperti kuota minimal 30% perempuan dalam struktur organisasi dan pencalonan legislatif. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang mencakup beberapa aspek diantaranya:

a. Tantangan Kultural dan Sosial dalam Penguatan Representasi Perempuan

Pandangan tradisional tentang peran gender masih sangat kental dalam masyarakat Indonesia, yang berdampak pada politik dan representasi perempuan di dalamnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengaruh stereotip gender yang kuat, terutama terkait dengan peran perempuan dalam ranah domestik. Beberapa program pendidikan politik yang diadakan oleh PDI Perjuangan, seperti pelatihan memasak dan urban farming, meskipun dirancang untuk memberdayakan perempuan, berisiko memperkuat stereotip tersebut. Kegiatan yang berfokus pada peran domestik dapat membatasi potensi perempuan untuk terlibat dalam bidang politik yang lebih strategis dan mempengaruhi pengambilan keputusan secara luas. Oleh karena itu, penting bagi PDI Perjuangan untuk mengembangkan program yang lebih mengarah pada pengembangan kepemimpinan perempuan di level politik dan kebijakan publik.

b. Keterbatasan Representasi Strategis dalam Struktur Partai

Meskipun PDI Perjuangan telah mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam struktur partai, keterwakilan tersebut masih terbatas pada posisi-posisi non-strategis. Di DPC Kota Semarang, dari 19 pengurus, hanya 6 yang merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuota telah terpenuhi, perempuan masih kesulitan untuk menduduki posisi dominan dalam struktur partai, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterbatasan ini, meskipun secara

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:

SINTA 5



PKP|INDEX





kuantitatif keterwakilan perempuan telah tercapai, secara kualitatif mereka belum mampu mendominasi kebijakan partai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk menempatkan perempuan di posisi-posisi strategis yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan secara lebih signifikan.

c. Ketidakmerataan Kesetaraan Peluang

Salah satu tantangan besar dalam implementasi affirmative action adalah ketidakmerataan kesetaraan peluang bagi perempuan. Meskipun kebijakan kuota telah diimplementasikan, tidak semua perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam memanfaatkan peluang tersebut. Banyak perempuan masih bergantung pada struktur partai untuk memperoleh posisi strategis, alih-alih mengandalkan kapasitas dan kemampuan mereka secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif, meskipun bermanfaat, belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi hambatan struktural yang ada. Untuk mengatasi ini, PDI Perjuangan perlu mempertimbangkan dukungan yang lebih konkret bagi perempuan untuk mengatasi peran domestik dan memberikan pelatihan lebih lanjut agar mereka bisa bersaing secara lebih merata di dunia politik.

d. Keberlanjutan Penguatan Perempuan dalam Politik

Keberlanjutan penguatan perempuan dalam politik sangat bergantung pada adanya strategi jangka panjang. PDI Perjuangan telah merencanakan untuk mengadakan kongres pada tahun 2025 yang akan membahas pengarusutamaan gender dalam visi dan misi partai. Meskipun kebijakan affirmative action telah membantu meningkatkan keterwakilan perempuan, tantangan yang dihadapi dalam memastikan efektivitas kebijakan ini masih besar. Tanpa adanya strategi yang lebih terencana dan berkelanjutan, perempuan mungkin masih akan menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan penguatan perempuan, PDI Perjuangan perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada, dengan fokus pada peningkatan kualitas partisipasi perempuan dalam politik, bukan hanya pada pemenuhan kuota.

## KESIMPULAN

Implementasi *affirmative action* di PDI Perjuangan Kota Semarang menunjukkan komitmen partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Dengan kebijakan kuota 30% perempuan di struktur partai dan pencalonan legislatif, PDI Perjuangan telah menciptakan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi pendorong utama kebijakan ini, menjadikannya bagian penting dalam visi partai. Strategi seperti sistem *zipper* dan pencalonan perempuan di berbagai daerah pemilihan menunjukkan langkah maju, meskipun tantangan seperti hambatan kultural dan stereotip gender masih ada.

Meskipun kuota perempuan telah terpenuhi, tantangan terbesar adalah memastikan perempuan tidak hanya hadir secara jumlah, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Program pemberdayaan perempuan berhasil meningkatkan partisipasi, namun keterlibatan mereka dalam posisi strategis masih terbatas. Untuk memastikan keberlanjutan penguatan perempuan di politik, PDI Perjuangan perlu mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih inklusif. Kongres partai pada tahun 2025 dapat menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pengarusutamaan gender dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam bersaing secara independen, menjadikan *affirmative action* sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

## REFERENSI

- CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). (1979). United Nations.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 117-135.
- Holzer, H., & Neumark, D. (2000). Assessing affirmative action. *Journal of Economic literature*, 38(3),

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

483-568.

- Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University Press.
- Mansbridge, J. (1999). "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes.'" *Journal of Politics*.
- Mufrikah, S. (2020). KETERBATASAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL INDONESIA: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 47-66.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2): 203–228.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Ramdani, R. (2015). PEREMPUAN, POLITIK, DAN PARLEMEN DI KOTA MAKASSAR.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. Diterjemahkan Fauzan, U., & Prasetyo, H. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Menara Riau*, 12(1): 41–47.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)